

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Teluk Panjang

¹Asra'i Maros, ¹Joko Sunaryo, ¹Nanang Al Hidayat.

¹Dosen TIA Setih Setio Muara Bungo,
E-mail: Marosbae93@gmail.com

Abstrak

Jumlah dana desa yang besar belum berbanding lurus dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang, pembangunan terkesan asal-asalan, tidak tepat sasaran serta tidak berdayaguna bagi masyarakat. Hasil survei di ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan hambatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang. Hasil penelitian, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, *pertama* faktor internal, yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, sedangkan *kedua* faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Desa yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Dusun Teluk Panjang terkesan tidak partisipatif dan bersifat *top down*.

Kata Kunci : Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan, Desa, Faktor Penghambat

Abstract

The large amount of village funds has not been directly proportional to the development carried out by the Teluk Panjang Village Government, development seems careless, not right on target and powerless for the community. The survey results found that road construction that had not been properly carried out had been carried out, even though the old road conditions were still suitable for use. This study aims to analyze and describe the barriers to community participation in development planning in Teluk Panjang Village. The results showed that the inhibiting factors for community participation in development planning were internal factors, which were related to the low knowledge and education factors, as well as the time-consuming factor of community work which made the community not maximally involved and participated in village development planning, while the two factors external, which is related to the role of the stakeholders, in this case the Village Government, which is too dominant in the village development plan, while the community and BPD seem passive, so that the development carried out in Teluk Panjang is not participatory and is top down in nature.

Keywords: Participation, Planning, Development, Village, Inhibiting Factors

PENDAHULUAN

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami perubahan yang signifikan, dimana untuk tahun 2019 saja setiap desa mendapatkan kucuran dana sebesar 900 juta. Keuangan desa tidak hanya bersumber dari DD tapi juga bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa), pedapatan asli desa serta sumber lainnya, dimana semua itu diperuntukkan untuk belanja desa seperti belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Belanja desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa merupakan belanja yang dilakukan untuk pembangunan desa seperti pembangunan sarana jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pembangunan saluran irigasi dan pembangunan sarana lainnya. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan nasional, dimana dalam mekanismenya pembangunan tersebut merupakan perpaduan antara dua kelompok utama yaitu pemerintah dan masyarakat. Disamping peran pemerintah, peran serta (partisipasi) dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dimana masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan, karena hakekatnya pembangunan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan artinya masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan oleh desa. Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karakteristik *bottom-up*, karena masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, seharusnya merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan oleh desa akan tepat sasaran, tepat waktu, berdayaguna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat.

Namun fakta dilapangan masih banyak ditemukan kasus pembangunan fisik di desa-desa yang tidak tepat sasaran, tidak berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat, salah satu kasus yang terjadi di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Desa yang terdiri dari enam Rukun Tangga (RT) ini merupakan salah satu desa yang geliat pembangunan khususnya bangunan fisiknya lagi gencar dilakukan, akan tetapi pembangunan-pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang terkesan asal-asalan dan tidak membangun sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Hasil survei di lapangan menemukan pembangunan sarana jalan baru yang menghubungkan antara RT. 02 dan RT. 05 belum semestinya dilakukan namun telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Sementara itu pembangunan bidang pendidikan, pertanian lebih penting untuk dilakukan. Dari studi kasus diatas mengindikasikan bahwa pembangunan khususnya bangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang tidak melalui proses perencanaan dan pembuatan skala prioritas yang benar, dan terkesan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom-up* belum terlaksana dengan baik. Atas kasus tersebut menarik rasanya mengkaji lebih mendalam bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah yang menjadi hambatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Teluk Panjang, BPD Desa Teluk Panjang, Pedamping Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 13 orang yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, tanpa terkecuali pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Menurut Husnul Imtihan dkk (2017:8) “bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*); Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*); Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)”. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan (*idea planing stage*) pembangunan, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang mutlak adanya, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa “perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”. Artinya dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan BPD tapi juga harus melibatkan masyarakat. Dalam paradigma pembangunan saat ini masyarakat tidak hanya menjadi obyek (kelompok sasaran) dalam pembangunan namun mereka sekaligus sebagai subjek (pelaku) dalam pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des). Untuk RPJM-Des disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan RKP-Des merupakan penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kegiatan pelibatan masyarakat dalam rencana pembangunan desa baik dalam penyusunan RPJM-Des maupun RKP-Des salah satunya diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Pada kegiatan Musrebangdes tersebut diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, untuk unsur masyarakat sendiri sesuai yang diatur dalam Permendagri 114 tahun 2014 pada Pasal 25 Ayat 2, yaitu terdiri dari “tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin”.

Berdasarkan hasil temuan, penulis menyimpulkan bahwa RPJM-Des Desa Teluk Panjang sudah disusun dan disahkan pada tahun 2018, dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Teluk Panjang Tahun 2018-2024, dan ditetapkan melalui Peraturan Dusun Teluk Panjang Nomor 06 Tahun 2018. Sedangkan RKP-Des Desa Teluk Panjang telah disusun dan ditetapkan pada bulan Juli tahun 2019 hal ini sesuai yang dicantumkan di dokumen Berita Acara Musrebangdes Tahun 2019 RKP-Des Desa Teluk Panjang. Untuk keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan Dusun Teluk Panjang baik dalam penyusunan RPJM-Des maupun RKP-Des yang diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam Musrebangdes, untuk Desa Teluk Panjang belum secara maksimal masyarakatnya dilibatkan dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena belum semua unsur/ tokoh masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Musrebangdes tersebut, hal ini dibuktikan dari arsip list daftar surat undangan yang dikirim dan daftar hadir kegiatan tersebut, dalam daftar tersebut tidak terdapat unsur pemuda, tokoh pendidikan dan kelompok masyarakat miskin didalamnya. Ada dua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Pada perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yang menjadi hambatan internal pada saat Musrenbangdes dilakukan yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih beranggapan bahwa keterlibatan atau partisipasi mereka pada kegiatan Musrenbangdes tidak mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan mereka juga beranggapan bahwa saat mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes tidak akan menjadi masalah terkait pembangunan yang ada di Desa Teluk Panjang. Faktor pengetahuan masyarakat Desa Teluk Panjang yang masih rendah terhadap pentingnya keterlibatan atau partisipasi mereka pada kegiatan Musrenbangdes salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakatnya, menurut Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati (2013:91) "Pendidikan tinggi mengajarkan orang untuk berpikir lebih logis dan rasional, dapat melihat sebuah isu dari berbagai sisi sehingga dapat lebih melakukan analisis dan memecahkan suatu masalah". Seperti dari data yang didapat bahwa hanya 12% masyarakat Desa Teluk Panjang yang menempuh pendidikan perguruan tinggi, bahkan 13% warga dari Desa Teluk Panjang tidak pernah mengenyam pendidikan dasar (SD). Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang.

Selain faktor pengetahuan dan pendidikan, faktor penghambat internal yang lain yaitu berkaitan dengan faktor pekerjaan masyarakat Desa Teluk Panjang. Mayoritas masyarakat Desa Teluk Panjang berprofesi sebagai petani, ada sekitar 85% dari 1729 orang warga Desa Teluk Panjang berprofesi sebagai petani. Jam kerja petani yang ada di Desa Teluk Panjang berkisar 10 sampai 12 jam, mulai terbit matahari hingga tebenam matahari. Tentunya pekerjaan yang banyak menyita waktu ini berdampak kepada sedikitnya waktu untuk kegiatan lainnya, termasuk terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes. Berdasarkan temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan internal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan sebagai pertarungan kelompok kepentingan (*stakeholder*), dalam hal ini *stakeholder* yang memiliki kepentingan seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan lain sebagainya. Siapa yang mempunyai pengaruh yang besar, maka *stakeholder* tersebut akan memiliki dan mempunyai posisi penting guna menentukan arah kebijakan kedepan. Berbicara *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang, tentunya Pemerintah Desa memiliki pengaruh dan peran yang paling besar dalam menentukan arah pembangunan yang ada di Desa Teluk Panjang, karena BPD dan unsur masyarakat dinilai pasif dalam rencana pembangunan desa. Peran besar Pemerintah Desa Teluk Panjang pada kegiatan Musrenbangdes, sayangnya tidak diikuti atau berbanding lurus dengan arah kebijakan pembangunan yang baik pula bagi masyarakat Desa Teluk Panjang, hal ini menjadi salah satu hambatan pembangunan yang terjadi di Desa Teluk Panjang, karena peran Pemerintah Desa yang terlalu dominan dalam kegiatan rencana pembangunan desa, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Panjang terkesan tidak partisipatif dan bersifat *top down*.

Pembangunan yang bersifat *top down* tentunya banyak merugikan masyarakat karena arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai kehendak pemerintah bukan kehendak masyarakat, hal ini juga didukung oleh pendapat Retno Susanti ddk (2019:41) bahwa “Berdasarkan empiris di lapangan, dalam pelaksanaannya pendekatan tersebut dianggap kurang berhasil. Pendekatan *top down* sering kali terdapat unsur kepentingan di dalamnya sehingga tidak terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat”. Pembangunan yang tidak bisa mewakili kebutuhan masyarakat didalamnya, tentunya pembangunan tersebut tidak akan berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat Desa Teluk Panjang. Berdasarkan temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan eksternal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yaitu berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Panjang yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Panjang terkesan tidak partisipatif dan bersifat *top down*.

SIMPULAN DAN SARAN

Ada dua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi hambatan internal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang. Sedangkan yang menjadi hambatan eksternal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang yaitu berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Panjang yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Panjang terkesan tidak partisipatif dan bersifat *top down*.

Ada beberapa saran terkait dengan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang, yaitu:

1. Hendaknya perencanaan pembangunan desa yang melalui mekanisme Musrenbangdes harus melibatkan semua unsur dan kelompok masyarakat yang ada di Desa Teluk Panjang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2. Terkait keterlibatan masyarakat yang belum maksimal dalam kegiatan Musrenbangdes karena faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, hendaknya hal ini menjadi konsen dari Pemerintah Desa, untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara mensosialisasikan secara menyeluruh dan terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.
3. Hendaknya BPD Desa Teluk Panjang lebih aktif dalam proses Musrenbangdes berlangsung, BPD sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, hendaknya mampu memberikan saran dan masukan yang bersifat partisipatif dalam Musrenbangdes, agar pembangunan di Desa Teluk Panjang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dea Deviyanti. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Jurnal eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2.
- Elida Imro'atin Nur Laily. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Jurnal Volume 3, Nomor 2.
- Fathurrahman Fadil. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2.
- Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, SE, Dr. M. Firmansyah M.Sc. (2016). *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)*. Jurnal Neo-Bis, Volume 11, No 1, Juni 2017.
- Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati. (2013). *Hubungan ANTARA Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Studi Korelasi pada Penduduk Umur 10–24 Tahun di Jakarta Pusat*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 17 No. 1 Januari 2014: 89–95.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.
- Nanang Al Hidayat, Asra'i Maros. (2019). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)*. Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA), Vol. 3 No. 3 Desember 2019, hlm. 89-99.
- Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Retno Susanti, Djoko Suwandono, Mussadun. (2019). *Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen*. JURNAL PASOPATI - Vol. 1, No. 2 Tahun 2019.
- Slamet. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suharmi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penelitian ini, lebih khusus ucapan terima kasih kepada:

1. Hasdani, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo.
2. Amri HR dalam hal ini sebagai Kepala Desa Teluk Panjang.
3. Aziz HR dalam hal ini sebagai Ketua BPD Desa Teluk Panjang.
4. Seluruh warga masyarakat Desa Teluk Panjang.